

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN PROPOSISI

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu sebagai bahan acuan dan pertimbangan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini dengan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dalam penelitian ini dicantumkan hasil penelitian terdahulu yang pernah peneliti baca sebelumnya:

Tabel 2. 1

Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan			
			Teori Yang Digunakan	Pendekatan	Metode	Teknik Analisis
1.	Hamami Cahya Prastika	Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan	Teori Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM menurut Gede Diva (2009:15-18) dan Teori Partisipasi menurut Cohen dan Uphoff dalam Distianto (2016)	Kualitatif	Deskriptif	Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan

2.	Ety Purnama Sari	Evaluasi Kebijakan Program Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Studi di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi)	Teori Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik menurut James Anderson dalam Winarno (2002:168)	Kualitatif	Deskriptif	Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan .
3.	Abdul Wahab	Implementasi Kebijakan Pembinaan Kewirausahaan Pemuda di Kabupaten Maros	Teori Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III (1980:9)	Kualitatif	Deskriptif	Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan .

Sumber : Peneliti, 2023

1) Hamami Cahya Prastika

Peneliti pertama dilakukan oleh Hamami Cahya Prastika (2017) yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dengan menggunakan Teori Peran Pemerintah menurut Gede Diva (2009:15-18) dan Teori Partisipasi menurut Cohen dan Uphoff dalam Distianto (2016) menjelaskan peran

pemerintah dan partisipasi pelaku UMKM dalam upaya pengembangan kerajinan kulit di Kabupaten Magetan sudah berjalan dengan baik, yang dimana dilihat dari hasil penelitian bahwa peran pemerintah yaitu terdapat pada peran pemerintah sebagai fasilitator karena pemerintah berperan dalam penyediaan alat berupa mesin jahit, menyediakan wadah pendampingan tim digital e-IKM serta memberikan pelatihan. Sedangkan pada partisipasi pelaku UMKM, tipologinya terdapat pada partisipasi pemanfaatan hasil karena pelaku UMKM menggunakan mesin pemberian dari pemerintah dan mengikuti program pelatihan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk pengembangan UMKM kerajinan kulit memberikan hasil yaitu peningkatan kualitas produksi hingga menjadi produk unggulan Kabupaten Magetan. Hanya saja terkendala oleh masalah Sumber Daya Manusia yang semakin berkurang serta memiliki skill yang rendah.

Adapun persamaan penelitian yang penulis buat, dengan penelitian terdahulu memiliki kesamaan menggunakan metode deskriptif, pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif, dan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selain itu juga teori yang digunakannya sama dengan penelitian ini yaitu Teori Peran Pemerintah dalam pengembangan UMKM menurut Gede Diva (2009:15-18). Adapun perbedaan penelitiannya yaitu yang pertama, dari fokus dan topik penelitian yang penulis ambil pada skripsi ini yaitu pengembangan wirausaha pemuda di Kota Bandung (Studi: Program “Camp Entrepreneur DISPORA”). Sedangkan fokus dan topik pada peneliti terdahulu yaitu Peran Pemerintah

Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan. Perbedaan yang kedua, yaitu lokus penelitian. Lokus penelitian yang penulis pilih pada skripsi ini di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung. Sedangkan pada peneliti terdahulu yaitu di Pusat Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Magetan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.

2) Ety Purnama Sari

Peneliti kedua dilakukan oleh Ety Purnama Sari (2019) yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Program Pengembangan Kewirausahaan Pemuda”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dengan menggunakan Teori Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik menurut James Anderson dalam Winarno (2002:168) menjelaskan bahwa kebijakan dalam program pengembangan kewirausahaan pemuda pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi di Kota Jambi yaitu melalui pendidikan, pelatihan, magang, bimbingan dan pendampingan. Adapun kendala yang dialami dalam program pengembangan kewirausahaan ini yaitu masih kurangnya minat pemuda dalam mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam berwirausaha, selain itu juga kendala lainnya yaitu dalam hal anggaran dalam membuat program pengembangan kewirausahaan tersebut tidak dilaksanakan lagi khususnya pada tahun 2019. Adapun upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut

yaitu dengan mengisi pelatihan dengan pemberian materi tentang motivasi dengan mendatangkan narasumber yang berkecimpung di dunia wirausaha, meningkatkan kualitas pelayanan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana. Evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi di Kota Jambi terhadap program pengembangan kewirausahaan pemuda ini yaitu dengan memberikan wewenang kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota untuk melaksanakan program dan perbaikan sistem perekrutan peserta pelatihan.

Adapun persamaan penelitian ini yaitu metode penelitian menggunakan metode deskriptif, pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif, dan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, adapun perbedaannya yaitu yang pertama, dari fokus dan topik penelitian yang penulis ambil pada skripsi ini yaitu pengembangan wirausaha pemuda di Kota Bandung (Studi: Program “Camp Entrepreneur DISPORA”). Sedangkan fokus dan topik pada peneliti terdahulu yaitu evaluasi kebijakan program pengembangan kewirausahaan pemuda pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi. Perbedaan yang kedua, yaitu teori yang diambil oleh penulis pada skripsi ini yaitu Teori Peran Pemerintah dalam pengembangan UMKM menurut Gede Diva (2009:15-18) sedangkan teori yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu Teori Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik menurut James Anderson dalam Winarno (2002:168). Perbedaan yang ketiga, yaitu lokus penelitian. Lokus penelitian yang penulis pilih yaitu di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.

Sedangkan pada peneliti terdahulu yaitu di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi di Kota Jambi.

3) Abdul Wahab

Peneliti ketiga dilakukan oleh Abdul Wahab (2015) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pembinaan Kewirausahaan Pemuda di Kabupaten Maros”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Hasil penelitian dengan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III (1980:9) menjelaskan bahwa kinerja daripada Kepala Dinas beserta seluruh jajarannya dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah khususnya Kebijakan Pembinaan Kewirausahaan Pemuda sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan. Namun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam melakukan pembinaan kewirausahaan pemuda ini belum maksimal, dikarenakan masih terdapat beberapa kendala. Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pembinaan pemuda di Kabupaten Maros. Faktor pendukungnya yang pertama yaitu, sumber daya terkait dengan pendanaan, sarana dan prasarana yang mendukung. Kedua yaitu struktur birokrasi yang mendukung terciptanya implementasi kebijakan pembinaan

kewirausahaan pemuda. Faktor penghambatnya, yang pertama dari faktor komunikasi yang tidak berjalan di setiap stakeholder, dan yang kedua yaitu dari faktor sikap pemuda yang apatis membuat implementasi kebijakan pembinaan kewirausahaan pemuda menjadi gagal.

Adapun persamaan penelitian ini yaitu metode penelitian menggunakan metode dekstriptif, pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif, dan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, adapun perbedaannya yaitu yang pertama, dari fokus dan topik penelitian yang penulis ambil pada skripsi ini yaitu pengembangan wirausaha pemuda di Kota Bandung (Studi: Program “Camp Entrepreneur DISPORA”). Sedangkan fokus dan topik pada peneliti terdahulu yaitu Implementasi Kebijakan Pembinaan Kewirausahaan Pemuda di Kabupaten Maros. Perbedaan yang kedua, yaitu teori yang digunakan oleh penulis pada skripsi ini yaitu Teori Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM menurut Gede Diva (2009:15-18) sedangkan teori yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu Teori Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III (1980:9). Perbedaan yang ketiga, yaitu lokus penelitian. Lokus penelitian yang penulis pilih pada skripsi ini di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung. Sedangkan pada peneliti terdahulu yaitu di Dinas Pemuda Olahraga dan Seni Kabupaten Maros.

2.1.2. Konsep Administrasi Publik

A. Pengertian Administrasi

Secara sederhana administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan memimpin, mengatur atau mengelola dan mengurus suatu usaha. Administrasi dalam arti sempit dimaknai sebagai kegiatan “tulis-menulis” “catat-mencatat”, “mengetik”, “surat-menyurat”, yaitu suatu proses kegiatan yang berkaitan dengan pengiriman informasi secara tertulis dimulai dari penyusunan, penulisan hingga pengiriman informasi dan sampai kepada pihak yang telah dituju. Semua proses kegiatan tersebut disebut juga “Tata Usaha”. Administrasi dalam arti luas adalah sebagai proses kerjasama saat penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

Sondang P. Siagian (2004:2) mengatakan bahwa “Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Nawawi (1990) mengatakan bahwa “Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”

Stephen P. Robbins (1983) mengatakan bahwa “Administrasi sebagai keseluruhan kegiatan-kegiatan untuk pencapaian tujuan secara efisien melalui kerja sama dengan orang lain”

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah proses kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien.

B. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi Publik ini memiliki dua suku kata yakni administrasi dan publik. Administrasi ini memiliki makna proses kerjasama yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara itu kata publik memiliki arti umum, Negara, dan masyarakat atau orang banyak. Administrasi publik ini konsepnya berhubungan dengan lingkungan pemerintah, maka dari itu perlu didukung dengan ilmu pengetahuan dan berbagai teknik serta prinsip manajemen sehingga anggota organisasi dapat menjalankan tugasnya, untuk mengimplementasikan rancangan-rancangan sasaran tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Pasolong (2010:8) mengatakan bahwa “Administrasi publik adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.”

Nicholas Henry (1982: 26) mengatakan bahwa:

“Administrasi publik merupakan kombinasi yang sangat beragam serta tidak berpola antara teori dan pelaksanaan. Administrasi Negara dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya serta meningkatkan responsibilitas kebijakan Negara terhadap berbagai kebutuhan sosial, dan juga melembagakan praktik-praktik manajerial agar terbiasa lebih efektif dan efisien”

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan yang tentunya berorientasi kepada kepentingan publik.

Paul H. Appleby, menjelaskan peran administrasi publik di berbagai aspek, sebagai berikut:

- a. **Dasar Pemerintah**
Sebuah pemerintah bisa eksis tanpa legislatif atau pengadilan yang independen. Tapi pemerintah tidak bisa eksis tanpa administrasi
- b. **Alat Untuk Menyediakan Layanan**
Administrasi publik terutama berkaitan dengan kinerja berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum.
- c. **Alat Untuk Menerapkan Kebijakan**
Pemerintah modern pergi jauh dalam merumuskan dan mengadopsi hukum kebijakan yang sehat dan peraturan. Ini tidak boleh dilupakan bahwa kebijakan tersebut, hukum, dan lain-lain tidak hanya dicetak kertas, deklarasi kertas seperti niat, dijabarkan menjadi kenyataan dengan administrasi publik sehingga mengubah kata-kata ke dalam tindakan dan bentuk menjadi zat.
- d. **Sebuah Kekuatan Penyeimbang Di Masyarakat**
Administrasi publik adalah kekuatan utama untuk membawa stabilitas di masyarakat. Ia telah mengamati bahwa meskipun pemerintah sering berubah, tapi perubahan kekerasan jarang dialami oleh administrasi. Sebuah elemen kontinuitas antara yang lama dan pesenan baru disediakan oleh administrasi publik. Ini tidak berlaku hanya perubahan konstitusional pemerintah di negara-negara demokratis, tetapi juga tercermin ketika ada perubahan revolusioner dalam bentuk dan karakter dari pemerintah.
- e. **Sebuah Alat Perubahan Sosial Dan Pembangunan Ekonomi**
Peran administrasi publik sebagai agen perubahan sangat penting di negara berkembang. Diharapkan negara saat ini bekerja untuk mempercepat perubahan sosial-ekonomi, bukan menjadi agen pasif untuk mempertahankan status quo.
- f. **Karakter Teknis**
Pemerintah hari ini diharapkan dapat memberikan berbagai layanan kepada penduduknya. Peningkatan jumlah fungsi yang dilakukan oleh pemerintah membutuhkan layanan yang sangat khusus, profesional dan teknis, administrasi publik modern biasanya merupakan galaksi semua pekerjaan suatu negara.

2.1.3. Konsep Organisasi

Pengertian organisasi secara sederhana organisasi dapat diartikan sebagai suatu wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan. Sasaran organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi diantaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing.

Robbins dalam Mariane (2018) mengatakan bahwa: “Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.”

Jones dalam Mariane (2018) mengatakan bahwa : “*An Organization is tool used by people individually or in groups to accomplish a wide variety of goals.*”. Jemes memahami sebuah organisasi adalah alat yang digunakan oleh orang-orang, baik secara individual maupun kelompok untuk menapai bermacam-macam tujuan.

Money dalam Mariane (2018) mengatakan bahwa : “*Organizationis the from off very human association for the attainment of common purpose*”. Mooney memahami organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk pencapaian suatu tujuan bersama.

Hasibuan dalam Mariane (2018) mengatakan bahwa : “Organisasi adalah suatu system perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu wadah yang terdiri dari unsur manusia yang saling bekerja sama dan saling menguntungkan untuk kepentingan bersama dalam mencapai tujuan organisasi

Ciri-ciri organisasi dikemukakan Ferland yang dikutip oleh Handayani (1985:3) sebagai berikut:

1. Adanya suatu kelompok orang dapat dikenal.
2. Adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu sama lain saling berkaitan (interdependent part) yang merupakan kesatuan usaha/kegiatan.
3. Tiap-tiap anggota memberikan sumbangan usahanya/tenaganya.
4. Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan.
5. Adanya suatu tujuan.

Organisasi terkadang dipandang sebagai wadah kegiatan orang juga dipandang sebagai proses, yaitu menyoroti interaksi diantaranya orang-orang yang menjadi anggota organisasi. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang saling berinteraksi dan mengembangkan organisasi yang bersangkutan. Organisasi dalam meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka mengoptimalkan kinerja pegawai tidak terlepas dari pemberdayaan potensi yang ada.

2.1.4. Konsep Pengembangan Wirausaha

A. Pengertian Pengembangan

P. Siagian (2012:254), mengatakan bahwa: “Pengembangan meliputi kesempatan belajar yang bertujuan untuk lebih meningkatkan pengetahuan (knowledge) dan keahlian (skill) yang diperlukan dalam pekerjaan yang sedang dijalani. “

Hafsah (2004) mengatakan bahwa: “Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha-usaha kecil agar menjadi usaha yang mandiri dan tangguh.”

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan adalah suatu usaha dan upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian dari setiap individu maupun kelompok dalam melakukan pekerjaan ataupun usahanya dimasa kini dan dimasa yang akan datang.

B. Pengertian Wirausaha

Machfoedz (2004:1), berpandangan bahwa “wirausaha adalah orang yang bertanggung jawab dalam menyusun, mengelola, dan mengukur risiko suatu usaha.”. Selanjutnya, dikemukakan bahwa masa sekarang wirausaha melakukan berbagai hal sehingga definisinya menjadi luas. Wirausaha merupakan inovator yang mampu memanfaatkan dan mengubah kesempatan menjadi ide yang dapat dijual dan dipasarkan, memberikan nilai tambah dengan memanfaatkan upaya, waktu, biaya, kecakapan, dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Mereka adalah pemikir mandiri yang memiliki keberanian untuk berbeda latar belakang dalam berbagai hal yang bersifat umum. Wirausaha adalah pembawa perubahan dalam dunia bisnis yang tidak mudah menyerah dalam berbagai kesulitan untuk mengejar keberhasilan usaha yang dirintis secara sederhana.

Meredith (2005), mengatakan bahwa: “Wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan yang melihat dan menilai kesempatan usaha

mengumpulkan serta sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan kesuksesan. “

Dun Steinhoff dan John F. Burgess (1993:35), mengatakan bahwa: “Wirausaha merupakan orang yang mengorganisasi, mengelola, dan berani menanggung risiko untuk menciptakan usaha baru dan peluang berusaha.”

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa wirausaha adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan kreativitas suatu bisnis dengan berani menanggung risiko yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai peluang yang ada.

Ciri-Ciri Wirausaha

Kasmir (27-28), mengatakan bahwa ciri ciri wirausaha yang berhasil sebagai berikut:

1. Memiliki visi dan tujuan yang jelas. Hal ini berfungsi untuk menebak kemana langkah dan arah yang dituju sehingga dapat diketahui langkah yang harus dilakukan oleh pengusaha tersebut.
2. Inisiatif dan selalu proaktif. Ini merupakan ciri mendasar dimana pengusaha tidak hanya menunggu sesuatu terjadi, tetapi terlebih dahulu memulai dan mencari peluang sebagai pelopor dalam berbagai kegiatan.
3. Berorientasi pada prestasi. Pengusaha yang sukses selalu mengejar prestasi yang lebih baik daripada prestasi sebelumnya. Mutu produk, pelayanan yang diberikan, serta kepuasan pelanggan menjadi perhatian utama. Setiap waktu segala aktivitas usaha yang dijalankan selalu dievaluasi dan harus lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.
4. Berani mengambil risiko. Hal ini merupakan sifat yang harus dimiliki seorang pengusaha kapanpun dan dimanapun, baik dalam bentuk uang maupun waktu.
5. Kerja keras. Jam kerja pengusaha tidak terbatas pada waktu, dimana ada peluang disitu dia datang. Kadang-kadang seorang pengusaha sulit untuk mengatur waktu kerjanya. Benaknya selalu memikirkan kemajuan usahanya. Ide-ide baru selalu mendorongnya untuk selalu bekerja keras dalam merealisasikannya. Tidak ada kata sulit dan tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan.

6. Bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankannya, baik sekarang maupun yang akan datang. Tanggung jawab seseorang pengusaha tidak hanya pada segi material, tetapi juga moral kepada berbagai pihak.
7. Komitmen pada berbagai pihak merupakan ciri yang harus dipegang teguh dan harus ditepati. Komitmen untuk melakukan sesuatu memang merupakan kewajiban untuk segera ditepati dan direalisasikan.
8. Mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak, baik yang berhubungan langsung dengan usaha yang dijalankan maupun tidak. Hubungan baik yang perlu dijalankan, antara lain kepada: para pelanggan, pemerintah, pemasok, serta masyarakat luas.

Karakteristik Wirausaha

Arman Hakim Nasution (2007:80-81), mengatakan bahwa karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha yaitu:

1. *Acievement orientation*, yaitu kemampuan menetapkan sasaran kerja dan strategi pencapaiannya.
2. *Impact an influence*, yaitu kemampuan meyakinkan orang lain baik secara lisan maupun tulisan.
3. *Analytical thinking*, yaitu kemampuan mengolah dan mengintrepetasikan data atau informasi.
4. *Conceptual thinking*, yaitu kemampuan menarik kesimpulan atau informasi terhadap masalah.
5. *Initiative*, yaitu kemampuan menghadirkan diri sendiri dalam kegiatan organisasi.
6. *Self confidence*, yaitu kemampuan meyakinkan diri sendiri atau tekanan lingkungan.
7. *Interpersonal understanding*, yaitu kemampuan memahami sikap, minat dan perilaku orang lain.
8. *Concern for order*, yaitu kemampuan menangkap dan mencari kejelasan informasi tugas.
9. *Information seeking*, yaitu kemampuan menggali informasi yang dibutuhkan.
10. *Team cooperation*, yaitu kemampuan bekerja sama dan berperan dalam kelompok.
11. *Expertise*, yaitu kemampuan menggunakan dan mengembangkan keahlian.
12. *Customer service orientation*, yaitu kemampuan menemukan dan memenuhi kebutuhan konsumen.
13. *Developing others*, yaitu kesediaan mengembangkan teman kerja secara sukarela.

2.1.5. Konsep Pemuda

Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun nanti yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Sebagai calon generasi penerus yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Secara internasional, WHO (*World Health Organization*) menyebut sebagai "*young people*" dengan batas usia 10-24 tahun, sedangkan usia 10-19 tahun disebut "*adolesceneae*" atau remaja. *International Youth Year* yang diselenggarakan tahun 1985, mendefinisikan penduduk berusia 15-24 tahun sebagai kelompok pemuda.

Pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Pemuda dikatakan sebagai generasi penerus yang harus dibina dan diarahkan peranannya dalam masa peralihan menuju suatu kedudukan yang bertanggung jawab dalam tatanan masyarakat sehingga pemuda selalu diharapkan menjadi tumpuan Bangsa dan Negara.

Taufik Abdulah (1974;6) mengatakan bahwa: "Pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Pemuda menghadapi masa perubahan sosial maupun kultural. "

Mukhlis (2007:1) mengatakan bahwa: "Pemuda adalah suatu generasi yang dipundaknya dibebani bermacam-macam harapan, terutama dari generasi lainnya. Hal ini dapat dimengerti karena pemuda diharapkan sebagai generasi penerus,

generasi yang harus mengisi dan melangsungkan estafet pembangunan secara berkelanjutan”.

Koentjaraningrat (1997) mengatakan bahwa: “Pemuda adalah suatu fase yang berada dalam siklus kehidupan manusia, dimana fase tersebut bisa kearah perkembangan atau perubahan. “

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 1 ayat (1), mendefinisikan bahwa “Pemuda adalah warga negara Indonesia Yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun”.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemuda merupakan individu yang memiliki fisik dan psikis yang sedang mengalami perkembangan, sehingga diharapkan dapat berperan penting untuk dapat memajukan bangsa.

2.1.6. *Camp Entrepreneur DISPORA*

CEMPOR (*Camp Entrepreneur DISPORA*) adalah sebuah program yang diadakan pada tahun 2021 yang diciptakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kota Bandung khususnya pada Bidang Infrastruktur Kepemudaan yang bertema “Kolaborasi Pelaku Usaha & Pemuda Kreatif Dalam Menumbuhkan Semangat Wirausaha Kreatif Kota Bandung”. Program CEMPOR (*Camp Entrepreneur DISPORA*) ini merupakan salah satu wujud peran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung dalam hal Pembinaan Infrastruktur Kepemudaan. CEMPOR (*Camp Entrepreneur DISPORA*) ini diwujudkan atas dasar Undang-Undang No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang didalamnya terdapat 3 esensi yaitu: Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan. Selain itu juga CEMPOR (*Camp Entrepreneur*

DISPORA) ini sebagai wujud nyata Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dan Kepeloporan Pemuda serta penyediaan sarana dan prasarana, Peraturan Daerah Kota Bandung No 1 Tahun 2016 tentang Kepemudaan yang memuat aspek pelayanan kepemudaan dan upaya pengembangan kepemudaan, Peraturan Walikota Kota Bandung No 27 Tahun 2022 perubahan atas Peraturan Walikota Bandung No 35 Tahun 2020 tentang Pembangunan dan Pengembangan Ruang Kepemudaan (*Youthspace*), dan yang terbaru mengacu pada Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No 1 Tahun 2023 tentang Kewirausahaan Pemuda yang memuat aspek peningkatan daya saing kewirausahaan pemuda di yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

CEMPOR (Camp Entrepreneur DISPORA) merupakan program pendampingan lanjutan kepada pemuda atau pemuda terpilih di Kota Bandung yang berumur 16-30 tahun dan berdomisili Kota Bandung yang memiliki keinginan untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan. Adapun tujuan dari CEMPOR (Camp Entrepreneur DISPORA) yaitu untuk melatih dan menciptakan 30 wirausaha pemuda setiap tahunnya yang tangguh yang memiliki semangat berjuang dan berbagi, serta meningkatkan kemampuan, kepemimpinan dalam kewirausahaan yang kreatif dan inspiratif. Dalam program CEMPOR (Camp Entrepreneur DISPORA) ini para pemuda mengikuti pelatihan yang diberi ilmu oleh instruktur yang ahli dibidangnya sehingga pemuda ini diberdayakan agar memiliki daya saing, berkualitas, dan memiliki kapasitas.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung tentu dalam menjalankan program CEMPOR (Camp Entrepreneur DISPORA) ini tidak terlepas dari berbagai kolaborasi dengan banyak pihak atau aktor. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung menggunakan metode kolaborasi Hexahelix (Pemerintah, Akademisi, Praktisi Usaha, Komunitas, Media, dan Finansial) dengan tujuan agar dapat mendukung jalannya program CEMPOR (Camp Entrepreneur DISPORA) ini dengan baik dan untuk mempercepat akselerasi dan daya saing pemuda lebih berkualitas. Berikut pihak yang turut berkolaborasi dalam program CEMPOR (Camp Entrepreneur DISPORA) sebagai berikut: : Bank BJB, Shopee, Bli-Bli, Paxel, X-Channel, Yukolab.id, Warung Kopi Gunung, Cartenz, Tracker, REI, Media (Detikcom, Tribun Jabar, Media Indonesia, Warta Ekonomi.co.id, Harian Republika, Bisnis.com), Pemerintah (Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung, , Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung (BAZNAS), Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung (DPMPTSP)

Berikut langkah-langkah dalam program CEMPOR (*Camp Entrepreneur DISPORA*), yaitu:

1. Registrasi

Tahap pertama dalam program CEMPOR (Camp Entrepreneur DISPORA) ini yaitu registrasi. Registrasi ini bisa diakses oleh peserta melalui website CEMPOR (Camp Entrepreneur DISPORA) (<https://www.cemporbandung.id/>) yang tersedia di bio instagram CEMPOR (Camp Entrepreneur DISPORA). Adapun didalam tahap registrasi ini, peserta harus mengisi data diri, seperti: e-

mail, nama pelaku usaha, NIK, alamat, kelurahan, kecamatan, agama, tempat lahir, tanggal lahir, usia, *username* instagram, serta mengisi berbagai pertanyaan yang tersedia.

2. *Talent Mapping*

Setelah peserta melakukan registrasi di website yang disediakan, lalu peserta yang lolos seleksi administrasi atau memenuhi persyaratan yang ada lalu selanjutnya diarahkan untuk mengikuti *Talent Mapping*, yang dimana *talent mapping* ini bertujuan untuk memetakan potensi setiap individu yang dibantu oleh tenaga ahli. Peserta dalam talent mapping ini mengikuti berbagai *assessment* atau ujian agar muncul dan terlihat potensi dari setiap individunya.

3. Pelatihan Dasar

Setelah melakukan registrasi dan *talent mapping*, para peserta mengikuti pelatihan dasar. Di dalam pelatihan dasar ini diwujudkan lah esensi penyadaran sesuai dengan UU No 40 Tahun 2009. Yang dimaksud penyadaran disini yaitu diarahkan apa saja yang dibutuhkan oleh setiap individu, diberi materi dan pengetahuan secara mendasar yang sesuai dengan bidang usaha yang ditekuninya. Seperti pemberian bimbingan mengenai alat dan bahan yang harus dipersiapkan dalam usaha yang tekuninya. Didalam tahap pelatihan dasar ini difokuskan kepada pelatihan secara basic terutama di bidang produksi, dengan tujuan untuk melatih para peserta dan membangun pemahaman serta mengenal tingkat kerumitan hingga resiko dari sisi produksi. Adapun pelatihan dasar yang dapat dipilih oleh wirausahawan pada program CEMPOR (Camp Entrepreneur DISPORA) ini yaitu: Barbershop, Barista, Videografi & Editing, Animasi,

Wood Craft, Desain Produk & Kemasan Makanan, *Pastry & Bakery*, Fotografi (Foto Produk), *Body Care*, Konten Kreator, dan Pelatihan Exportir.

4. Inkubasi

Perwakilan peserta terbaik dan telah lolos tes dari pelatihan dasar, maka para peserta berhak mengikuti rangkaian kegiatan Inkubasi, yang terdiri dari kegiatan:

a. Pendampingan

Di dalam pendampingan ini, para peserta diberi kembali pelatihan yang lebih spesifik sesuai dengan hasil tes dari pelatihan dasar, selain itu juga di dalam pendampingan ini diberi bimbingan mengenai pemasaran, legalitas usaha, pengelolaan keuangan, dan latihan *public speaking*.

b. Asistensi

Di dalam tahap asistensi ini, di lakukan *buttom up* dan pemantauan oleh para tenaga ahli dipantau sejauh mana para peserta mengikuti pelatihan yang telah disediakan, apakah menemukan kesulitan atau terkendala sehingga dapat dibantu oleh tenaga ahli dalam tahap asistensi ini. Selain itu juga dalam tahap ini para peserta mencoba membuat plan bisnis.

c. Exhibition

Di dalam tahap ini dilakukan bisnis *matching* yaitu memperkenalkan produk itu kepada pasar atau publik. Didalam tahap ini juga produk daripada wirausaha pemuda ini dikenalkan pada opsteker, seperti: indomaret, yogya, alfamart. Jadi nanti pihak daripada minimarket atau supermarket tersebut memberi penilaian apakah produk yang diciptakan oleh para wirausaha ini

layak atau tidak, serta diberi saran dan evaluasi sebagai masukan untuk para peserta CEMPOR (Camp Entrepreneur DISPORA) ini. Selain bisnis *matching* di dalam tahap ini juga dilakukan pameran setiap produk daripada peserta yang diadakan disetiap kecamatan di Kota Bandung melalui *Youthspace*.

d. Camping

Camp atau Camping ini adalah tahap terakhir dalam program CEMPOR (Camp Entrepreneur DISPORA). Yang dimana dalam tahap ini dilakukan pengukuhan pada peserta yang lolos dan layak menjadi seorang wirausaha.

2.1.7. Konsep Peran Pemerintah

Peran pemerintah memiliki arti kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peran pemerintah memiliki fungsi memimpin, memberi petunjuk, memerintah, menggerakkan, koordinasi, pengawasan dan motivasi dalam hubungan pemerintahan dengan masyarakat.

Sondang P. Siagian (2009:132) mengemukakan bahwa: “Peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan.”

Talidzu Ndraha (2011) mengemukakan bahwa peranan pemerintah merupakan proses pemenuhan kebutuhan pihak yang diperintah akan jasa publik yang tidak

diprivatisasikan dan layanan sipil kepada setiap orang pada saat diperlukan sehingga menimbulkan hubungan transaksional seperti sebagai berikut:

- 1) Pemerintah menawarkan berbagai pilihan produk kepada masyarakat, setiap pilihan berisi janji.
- 2) Setiap warga masyarakat bebas memilih produk yang dianggapnya sesuai dengan aspirasinya. Kebebasannya itu dilindungi dan dijamin melalui *civil service*.
- 3) Jika konsumen telah menjatuhkan pilihan diantara produk yang ditawarkan, maka produsen/penjual (pemerintah) harus menepati janjinya.
- 4) Untuk menguji apakah janji tersebut ditepati, konsumen melakukan kontrol sosial terhadap produk yang diterimanya.
- 5) Jika janji ternyata ditepati, hal itu berarti produsen (pemerintah) bertanggung jawab jika tidak produsen harus bertanggung jawab.
- 6) Jika produsen (pemerintah) bertanggung jawab, dalam hal konsumen (masyarakat) tumbuh kepercayaan terhadap janji produsen (pemerintah).

Labolo (2010:32), mengemukakan bahwa “Peran pemerintah diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah sebagai unit kerja publik memenuhi dan melindungi tuntutan masyarakat yang di perintah”.

Labolo juga dalam bukunya tersebut menyebutkan bahwa peran pemerintah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- a. Pemerintah sebagai Regulator
Peran pemerintah sebagai regulator yakni menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan sebagai regulator. Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.
- b. Pemerintah sebagai Dinamisator
Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan dalam pemberian bimbingan dan pengarahan secara insentif efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.
- c. Pemerintah sebagai Fasilitator
Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. sebagai fasilitator pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui

pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta bidang pendanaan atau permodalan melalui bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Rasyid, (2011:32) membagi fungsi pemerintahan menjadi 4 bagian, yaitu:

1. Pelayanan (*Public Service*)
2. Pembangunan (*Development*)
3. Pemberdayaan (*Empowering*)
4. Pengaturan (*Regulation*)

Gede Diva (2009:15-18), mengatakan bahwa: “Peranan pemerintah yang efektif dan optimal dalam pengembangan UMKM”, sebagai berikut:

1. Fasilitator
Pemerintah harus menyediakan berbagai fasilitas dan jalan yang ditempuh agar dapat mencapai target yang dituju. Fasilitas yang dapat disediakan pemerintah dapat berupa pelatihan, pemberian bantuan atau berupa subsidi barang maupun jasa seperti memberikan sarana dan prasarana, pelatihan dan peningkatan keterampilan, permodalan dan pendanaan melalui kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sendiri.
2. Regulator
Peran pemerintah sebagai regulator yaitu membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah wirausaha dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif. Pemerintah merupakan pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis. Dalam fungsi regulator ini, pembagian wewenang dibagi menjadi dua yaitu, wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintahan daerah. Keduanya, memiliki wewenangnya sendiri untuk mengatur masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing.
3. Katalisator
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari katalisator adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat proses atau peristiwa. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah juga berperan sebagai pihak yang dapat mempercepat proses berkembangnya usaha. Pemerintah dapat melakukan berbagai langkah seperti pemberian penghargaan terhadap wirausaha, dan pemberdayaan komunitas kreatif dan produktif.

2.2. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir merupakan sebuah rancangan atau pola yang merupakan alur pemikiran peneliti dengan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan pada teori dari para ahli pada bidangnya yang relevan dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan, sehingga akan membantu peneliti dalam menjawab perumusan masalah yang ditentukan.

Penelitian yang dilakukan peneliti di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung yang berfokus pada peran pemerintah dalam pengembangan wirausaha pemuda di Kota Bandung melalui Program CEMPOR (Camp Entrepreneur DISPORA). Maka dari itu, untuk mengetahui apakah Dinas Pemuda dan Olahraga berhasil mengembangkan wirausaha pemuda di Kota Bandung, maka peneliti menggunakan teori dari Gede Diva (2009:15-18), yang mengemukakan bahwa ada 3 peran pemerintah dalam pengembangan UMKM yang efektif dan optimal:

1. Fasilitator

Pemerintah harus menyediakan berbagai fasilitas dan jalan yang ditempuh agar dapat mencapai target yang dituju. Fasilitas yang dapat disediakan pemerintah dapat berupa pelatihan, pemberian bantuan atau berupa subsidi barang maupun jasa seperti memberikan sarana dan prasarana, pelatihan dan peningkatan keterampilan, permodalan dan pendanaan melalui kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sendiri.

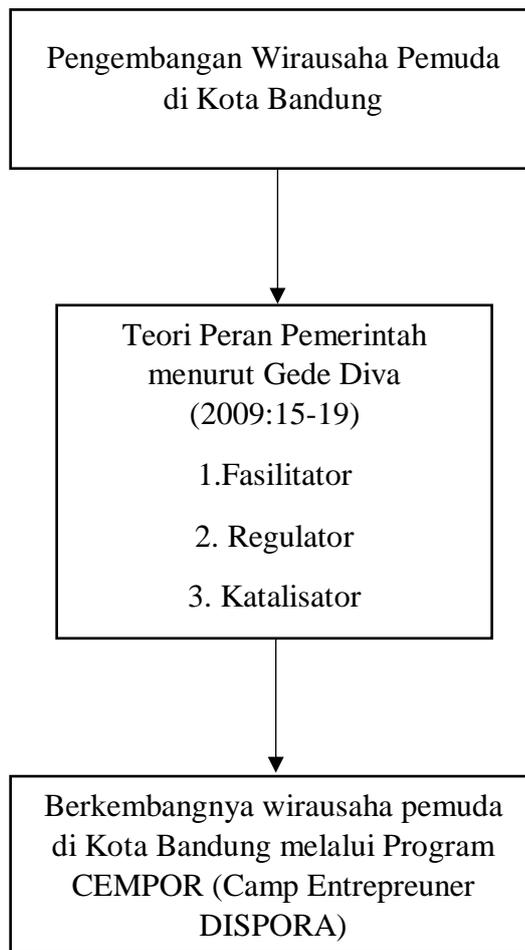
2. Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator yaitu membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah wirausaha dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif. Pemerintah merupakan pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis. Dalam fungsi regulator ini, pembagian wewenang dibagi menjadi dua yaitu, wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintahan daerah. Keduanya, memiliki wewengannya sendiri untuk mengatur masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing.

3. Katalisator

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari katalisator adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat proses atau peristiwa. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah juga berperan sebagai pihak yang dapat mempercepat proses berkembangnya usaha. Pemerintah dapat melakukan berbagai langkah seperti pemberian penghargaan terhadap wirausaha, dan pemberdayaan komunitas kreatif dan produktif.

Berdasarkan uraian di atas, maka peran pemerintah diharapkan dapat menjawab permasalahan pengembangan wirausaha pemuda di kota Bandung, melalui Program CEMPOR (Camp Entrepreneur DISPORA). Berikut bagan kerangka berpikir:



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Sumber: Peneliti, 2023.

2.3. Proposisi

Proposisi merupakan dugaan sementara dari sebuah penelitian terhadap kondisi yang terjadi. Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka dari itu, proposisi dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengembangan Wirausaha Pemuda di Kota Bandung (Studi: Program Camp Entrepreneur DISPORA) akan efektif , apabila memperhatikan indikator: a) Fasilitator, b) Regulator, c) Katalisator.
2. Terdapat kendala dalam pengembangan wirausaha pemuda di Kota Bandung. Berhasilnya pengembangan wirausaha pemuda di Kota Bandung apabila menggunakan teori dan indikator menurut Gede Diva (2009:15-18).